

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KOMISI NASIONAL DISABILITAS TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Oleh

NUR'AINI AZIRA GUSNIAR

Hak asasi manusia dimiliki oleh seluruh warga negara termasuk kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang memiliki tujuan, tugas, dan fungsi melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini mengkaji hak penyandang disabilitas dan efektivitas Komisi Nasional Disabilitas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki 22 hak dasar. KND telah melakukan pemenuhan hak secara tidak langsung bagi penyandang disabilitas, yaitu sebagai pengawas dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, efektivitas secara menyeluruh masih belum maksimal karena adanya hambatan pada faktor anggaran, sumber daya manusia yang terbatas, sistem teknologi informasi yang harus dikembangkan, rendahnya pemahaman masyarakat terkait eksistensi KND dan budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, KND perlu mendorong dari sisi alokasi anggaran, penambahan pegawai secara berjenjang, pelibatan organisasi penyandang disabilitas dan sosialisasi menyeluruh terkait eksistensi KND.

Kata Kunci: Hak Disabilitas, Komisi Nasional Disabilitas, KND, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT**THE EFFECTIVENESS OF THE NATIONAL COMMISSION ON
DISABILITIES IN FULFILLING THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES BASED ON LAW NUMBER 8 OF 2016 CONCERNING
PERSONS WITH DISABILITIES****By****NUR'AINI AZIRA GUSNIAR**

Human rights are owned by all citizens, including vulnerable groups, especially people with disabilities. The rights of people with disabilities are regulated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which mandates the National Commission on Disabilities as an independent non-structural institution whose objectives, duties, and functions are to monitor, evaluate, and advocate for the implementation of respect, protection, and fulfillment of the rights of Persons with Disabilities. This study examines rights people with disabilities and effectiveness the National Commission on Disabilities in fulfilling the rights of people with disabilities based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

This study employs a normative-empirical legal research method with a descriptive analytical approach. It employs a statutory regulatory approach and a conceptual approach. Data collection methods include literature review and interviews. Data processing involves data examination, classification, and compilation. Data analysis utilizes qualitative analysis.

The results of the research and discussion indicate that persons with disabilities have 22 basic rights. The KND has indirectly fulfilled the rights of persons with disabilities, namely as a supervisor by carrying out duties and functions as mandated by Law Number 8 of 2016, namely monitoring, evaluating, and advocating for the implementation of respect, protection, and fulfillment of the rights of persons with disabilities. However, overall effectiveness is still not optimal due to obstacles in budget factors, limited human resources, information technology systems that must be developed, low public understanding regarding the existence of KND and a legal culture of society that does not fully support the fulfillment of the rights of persons with disabilities. Therefore, KND needs to encourage budget allocation, increasing staff in a hierarchical manner, involving organizations of persons with disabilities and comprehensive socialization regarding the existence of KND.

Keywords: *Disability Rights, National Commission on Disabilities, KND, Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities.*